



**HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP  
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN  
PARTISIPASI POLITIK  
(Penelitian Pada Masyarakat Di Desa Kambangan  
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)**

**SKRIPSI**

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Psikologi

oleh

Meyninggar Dityanintyas

1511412017



**JURUSAN PSIKOLOGI  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERNYATAAN

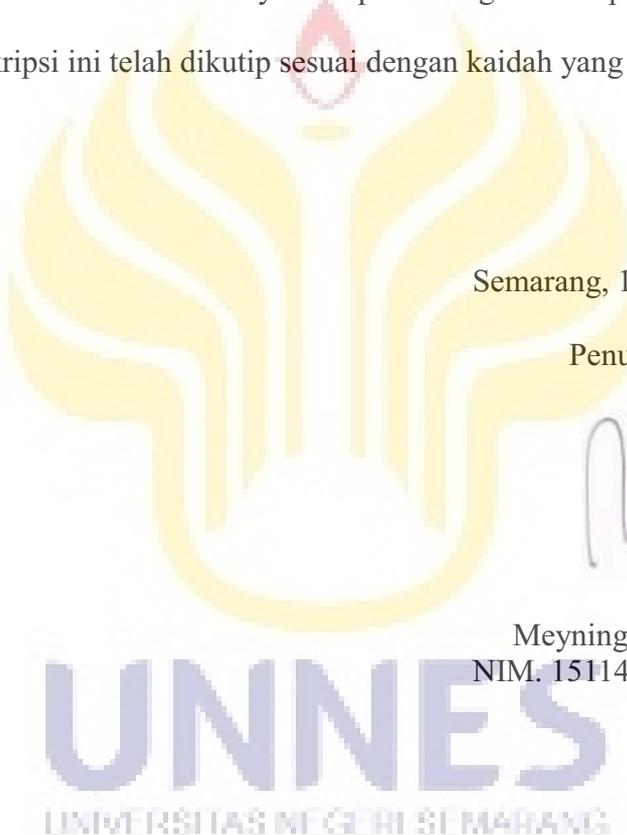
Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Persepsi terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan Partisipasi politik (Penelitian Pada Masyarakat di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo)” ini adalah hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun pengutipan yang terdapat di skripsi ini telah dikutip sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Semarang, 16 Juni 2017

Penulis



Meyninggar Dityanintyas  
NIM. 1511412017



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PENGESAHAN

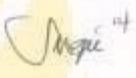
Skripsi dengan judul "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Dengan Partisipasi Politik (Penelitian Pada Masyarakat di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo)" telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada hari Jum'at, 16 Juni 2017.

Panitia Ujian Skripsi :

Ketua



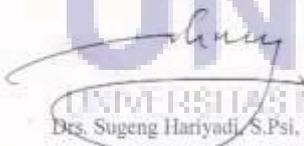
Sekretaris

  
Sugiariyanti, S.Psi., M.A  
NIP. 197804192003122001

Penguji I

  
Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi., M.A  
NIP.19791203 200501 1 002

Penguji II

  
Des. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S  
NIP. 195701251985031001

Penguji III

  
Rulita Hendriyani, S.Psi., M.Si.  
NIP. 19720204 200003 2 001

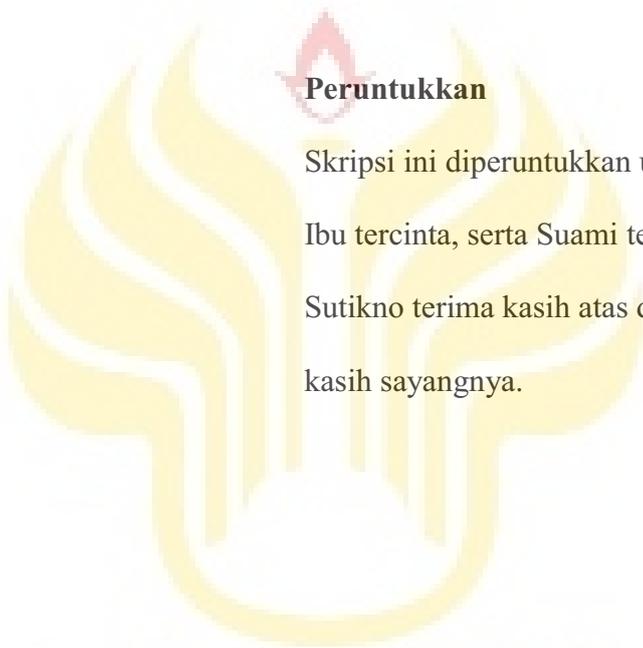
## MOTTO DAN PERUNTUKKAN

### Motto

Kesuksesan dapat dibeli dengan kerja keras dan pengorbanan (Penulis)

### Peruntukkan

Skripsi ini diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, serta Suami tercinta Praka Hadi Sutikno terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrabbi'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Dengan Partisipasi Politik ( Penelitian Pada Masyarakat Di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo)” dengan baik.

Penyusunan Skripsi ini ditunjukan sebagai tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang serta selaku Ketua Panitia Sidang Penguji Skripsi.
2. Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi, M.Si sebagai ketua Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang dan sekaligus dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, memberikan banyak petunjuk, arahan, semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Rulita Hendriyani, S.Psi., M.Si. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran sehingga Skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Penguji I Bapak Lutfi Fathan Dahriyanto, S. Psi.,MA

5. Yogi Swaraswati S.Psi., M. Si., Tim olah data.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Psikologi yang telah berkenan membagikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
7. Bapak, Ibu, Suami, ananda tercinta Afkar Arshaka, yang telah memberikan segenap doa, perhatian, dan dukungan yang tiada lelahnya kepada penulis.
8. Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman, Ajeng, Tia Meilana, Wildan, Dewi Mulyanah, Lani, Kak Steff yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
9. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang psikologi pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.



Semarang, 16 Juni 2017

Penulis

## ABSTRAK

Dityanintyas. Meyninggar. 2017. Hubungan antara Persepsi terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan Partisipasi politik (Penelitian Pada Masyarakat di desa Kambangan, kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo). *Skripsi*. Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S. dan Pembimbing II Rulita Hendriyani, S.Psi, M.Si

### **Kata Kunci : Persepsi , Partisipasi Politik, PILKADA**

PILKADA merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Banyaknya perubahan prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah ternyata membawa kekecewaan masyarakat karena politik oligarki yang dilakukan DPRD dalam PILKADA. Fenomena yang sering muncul dalam pelaksanaan PILKADA langsung di antaranya adalah rendahnya angka pemilih yang menggunakan hak pilih (*voters turnout*). Rendahnya partisipasi politik ini mengakibatkan meningkatnya angka Golput dalam proses PILKADA. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PILKADA baik pemilihan Gubernur maupun Bupati, dalam prosesnya masih tidak di lepaskan dari berbagai permasalahan. Permasalahan utama adalah Persepsi masyarakat yang sangat beragam tentang proses atau pelaksanaan PILKADA itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan partisipasi politik di desa Kambangan, kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Metode dasar dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif menggunakan penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 221 responden yang diambil menggunakan teknik *Quota Sample*. Validitas dalam penelitian ini adalah validitas konstruk dengan hasil validitas dan reliabilitas partisipasi politik 0,916 dan persepsi 0,658.

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi  $r_{xy} = 0,896$  dengan  $p = 0,000$  ( $p < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang di ajukan peneliti, yaitu “ada hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dengan Partisipasi politik pada masyarakat desa Kembangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo”, diterima.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERUNTUKAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.4.1 Manfaat Praktis .....	15
1.4.2 Manfaat teoritis .....	16
2. LANDASAN TEORI	
2.1 Partisipasi Politik .....	17
2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik .....	17

2.1.2 Dimensi partai politik .....	18
2.1.3 Bentuk-bentuk partisipasi politik .....	24
2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik .....	27
2.1.5 Tipe-tipe partisipasi politik .....	34
2.2 Persepsi .....	35
2.2.1 Pengertian Persepsi terhadap proses pemilukada .....	35
2.2.1.1 <i>Pengertian persepsi</i> .....	35
2.2.1.2 <i>Proses Pemilukada</i> .....	35
2.2.1.3 <i>Kesimpulan Persepsi terhadap proses Pemilukada</i> .....	39
2.2.2 Dimensi dalam persepsi .....	41
2.3 Hubungan Persepsi dengan Partisipasi Pemilukada.....	42
2.4 Kerangka berpikir.....	48
2.5 Hipotesis.....	49
<b>3. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	50
3.1.1 Jenis Penelitian .....	50
3.1.2 Desain Penelitian .....	50
3.2 Variabel Penelitian .....	51
3.2.1 Indetifikasi Variabel Penelitian.....	51
3.2.1.1 Variabel terikat .....	51
3.2.1.2 Variabel bebas .....	52
3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	52
3.3 Populasi dan Sampel .....	56

3.3.1 Populasi.....	56
3.3.2 Sample .....	57
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	58
3.4.1 Skala Partisipasi politik.....	59
3.4.2 Skala Persepsi .....	61
3.5 Validitas dan Reliabilitas.....	63
3.5.1 Validitas.....	62
3.5.2 Reliabilitas .....	63
3.6 Uji Coba Instrumen.....	66
3.6.1 Hasil Uji Coba Validitas.....	66
3.6.2 Hasil Uji Coba Reliabilitas .....	70
3.7 Teknik Analisis Data .....	71
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1 Persiapan penelitian .....	73
4.1.1 Orientasi kanchah penelitian.....	73
4.1.2 Penyusunan alat ukur .....	74
4.2 Pelaksanaan penelitian .....	76
4.2.1 Perijinan Penelitian .....	76
4.2.2 Penentuan Subjek Penelitian.....	77
4.2.3 Pengambilan Data .....	78
4.2.4 Pelaksanaan Skoring .....	78
4.3 Hasil Penelitian .....	79
4.3.1 Analisis Deskriptif.....	79

4.3.2 Gambaran Partisipasi Politik .....	80
4.3.2.1 Gambaran umum partisipasi politik .....	80
4.3.2.2 Gambaran Spesifik Partisipasi politik .....	82
4.3.2.2.1 Partisipasi politik berdasarkan ikut pemilihan umum .....	83
4.3.2.2.2 Partisipasi politik berdasarkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan Kampanye pemilihan umum.....	85
4.3.2.2.3 Partisipasi politik berdasarkan Aksi-aksi politik damai .....	87
4.3.2.2.4 Partisipasi politik berdasarkan aksi-aksi politik dengan menggunakan Kekerasan.....	90
4.3.3 Gambaran Persepsi .....	95
4.3.3.1 Gambaran umum persepsi masyarakat.....	95
4.3.3.2 Gambaran Spesifik Persepsi .....	97
4.3.3.2.1 Gambaran Persepsi Masyarakat Berdasarkan Pengetahuan.....	97
4.3.3.2.2 Gambaran Persepsi Masyarakat Berdasarkan Pengharapan .....	100
4.3.3.2.3 Gambaran Persepsi Masyarakat Berdasarkan Evaluasi.....	102
4.4 Demografi Subjek Penelitian .....	106
4.5 Analisis Inferensial.....	108
4.5.1 Hasil Uji Asumsi .....	109
4.5.1.1 Hasil Uji Normalitas .....	109
4.5.1.2 Hasil Uji Linieritas .....	110
4.5.1.3 Hasil Uji Hipotesis.....	111
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian .....	112
4.6.1 Pembahasan Analisis Persepsi masyarakat terhadap proses pemilihan kepala daerah dengan partisipasi politik .....	112
4.6.1.1 Pembahasan analisis Deskriptif partisipasi Politik.....	112
4.6.1.2 Pembahasan Analisis Deskriptif Persepsi masyarakat.....	118

4.6.2 Pembahasan analisis statistik partisipasi politik dan persepsi masyarakat .....	121
4.7 Keterbatasan Penelitian.....	122
5. PENUTUP.....	124
5.1 Simpulan .....	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	127



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah Pada Pilgub Jateng ....	4
1.2 Presentase Pelaksanaan Pemilu 2004.....	5
1.3 Tingkat Partisipasi masyarakat Purworejo pada Pilkada .....	7
3.1 Dimensi dan indikator Partisipasi politik.....	52
3.2 Dimensi dan indikator Persepsi.....	53
3.3 Favorable dan unfavorable partisipasi politik .....	58
3.4 <i>Blue Print</i> Partisipasi politik.....	59
3.5 <i>Blue Print</i> Persepsi.....	60
3.6 Kriteria koefisien korelasi.....	63
3.7 Hasil Uji Coba Validitas Partisipasi politik.....	65
3.8 Hasil Uji Coba Validitas Persepsi .....	67
3.9 Hasil Uji Coba Reliabilitas Partisipasi Politik.....	70
3.10 Hasil Uji Coba Reliabilitas Persepsi.....	70
3.11 Interpretasi Reliabilitas .....	70
4.1 Penggolongan Kriteria Analisis berdasarkan Mean Teoritis .....	79
4.2 Statistik Deskriptif Gambaran Umum Partisipasi Politik .....	80
4.3 Gambaran umum Partisipasi politik terhadap Pilkada di desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo .....	80
4.4 Statistik Deskriptif Gambaran spesifik partisipasi Politik berdasarkan ikut pemilihan umum .....	82
4.5 Gambaran spesifik partisipasi politik berdasarkan dimensi ikut pemilihan Umum.....	83
4.6 Statistik deskriptif partisipasi politik berdasarkan ikut serta dalam	

kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye pemilihan umum.....	85
4.7 Gambaran Spesifik partisipasi politik berdasarkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye pemilihan umum.....	85
4.8 Statistik deskriptif partisipasi politik berdasarkan aksi-aksi politik damai...	87
4.9 Gambaran spesifik partisipasi politik berdasarkan aksi-aksi politik damai..	88
4.10 Statistik deskriptif partisipasi politik berdasarkan Aksi-aksi menggunakan Kekerasan.....	90
4.11 Gambaran spesifik partisipasi politik berdasarkan aksi-aksi politik menggunakan kekerasan .....	90
4.12 Ringkasan Deskriptif Spesifik partisipasi politik.....	92
4.13 Perbandingan mean empiris tiap dimensi partisipasi politik.....	93
4.14 Statistik deskriptif gambaran umum persepsi masyarakat.....	94
4.15 Gambaran umum persepsi masyarakat.....	95
4.16 Statistik deskriptif persepsi berdasarkan pengetahuan.....	97
4.17 Gambaran spesifik persepsi berdasarkan pengetahuan .....	97
4.18 statistik deskriptif persepsi berdasarkan pengharapan .....	99
4.19 gambaran spesifik persepsi berdasarkan Pengharapan .....	100
4.20 Statistik deskriptif persepsi berdasarkan Evaluasi .....	102
4.21 gambaran spesifik persepsi berdasarkan Evaluasi .....	102
4.22 Ringkasan Deskriptif Spesifik Persepsi .....	103
4.23 Perbandingan Mean empiris dimensi Persepsi.....	104
4.24 Demografi subjek penelitian berdasarkan usia untuk memberikan hak suara.....	106
4.25 Demografi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin .....	106
4.26 Hasil Uji Normalitas Partisipasi politik dan Persepsi .....	109
4.27 Hasil Uji Linieritas Partisipasi politik dan Persepsi.....	110
4.28 Hasil Uji Hipotesis .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir .....	49
4.1 Diagram Gambaran spesifik Partisipasi Politik .....	81
4.2 Diagram Gambaran spesifik Dimensi ikut pemilihan umum.....	84
4.3 Diagram Gambaran Spesifik Dimensi Ikut Kegiatan Kampanye Dalam Pemilihan Umum .....	86
4.4 Diagram Gambaran Spesifik Dimensi Aksi-Aksi Politik Damai.....	89
4.5 Diagram Gambaran Spesifik Dimensi Aksi-Aksi Politik Menggunakan Kekerasan.....	91
4.6 Diagram Gambaran Ringkasan Deskriptif Spesifik Partisipasi Politik.....	92
4.7 Diagram Perbandingan Mean Empiris Tiap Dimensi Partisipasi Politik.....	93
4.8 Diagram Gambaran Umum Persepsi.....	96
4.9 Diagram Gambaran Spesifik Dimensi Pengetahuan.....	98
4.10 Diagram Gambaran Spesifik Dimensi Pengharapan.....	101
4.11 Diagram Gambaran Spesifik Dimensi Evaluasi.....	103
4.12 Diagram Gambaran Ringkasan Deskriptif Spesifik Persepsi Masyarakat..	104
4.13 Diagram Perbandingan Mean Empiris Tiap Dimensi Persepsi .....	105

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Skala Tryout.....	128
Skala Penelitian.....	135
Tabulasi tryout.....	142
Hasil Tryout variabel partisipasi politik.....	148
Hasil Tryout Variabel Persepsi.....	152
Tabulasi Penelitian.....	157
Hasil Penelitian.....	174
Surat Ijin.....	177
Foto atau dokumentasi.....	181



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah (Bupati, Walikota, dan Gubernur) dipilih langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Romli, 2008)

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD ternyata membawa kekecewaan masyarakat, karena politik oligarki yang dilakukan DPRD dalam memilih Kepala Daerah, dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai kerap memanipulasi kepentingan masyarakat luas, mekanisme PILKADA cenderung menciptakan ketergantungan Kepala Daerah terhadap DPRD daripada masyarakat. Dampak selanjutnya adalah kolusi dan *money politic*, khususnya pada proses pemilihan Kepala Daerah (Romli, 2008)

Melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, masyarakat dalam suatu wilayah diharapkan dapat menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpin daerahnya tanpa campur tangan dari pusat. Rakyat berpartisipasi langsung menentukan pemimpin daerah. Menurut Rush dan Althoff (2008:23), "Partisipasi

politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik”. PILKADA langsung juga merupakan wujud nyata asas *responsibilitas* dan *akuntabilitas*. Melalui pemilihan secara langsung, Kepala Daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. PILKADA langsung lebih *accountable*, karena rakyat tidak harus ‘menitipkan’ suara melalui DPRD tetapi dapat menentukan pilihan berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. (Romli, 2008)

Pemilihan Kepala Daerah langsung digagas sejak 2004 sebagai koreksi atas pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru yang melahirkan birokrat yang korupsi di daerah dan mengakibatkan masyarakat di daerah tidak dapat merasakan pembangunan yang merata, walaupun kekayaan alam di daerahnya sangat kaya tetapi lebih banyak dikorupsi oleh pejabat dan DPRD di daerah mereka, akibat Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Terbukti, banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD karena melakukan pemerasan kepada Kepala Daerah yang mereka pilih atau karena transaksi suap untuk melancarkan kebijakan dan program di daerah karena harus melalui persetujuan oleh DPRD. (Sumber: [www.ipmdinamika.com](http://www.ipmdinamika.com))

Pelaksanaan PILKADA di lapangan selalu saja rawan timbul masalah. Baik masalah yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat selesai pemilihan. Masalah tersebut antara lain kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap, masalah dalam penggunaan anggaran dan fasilitas negara terutama oleh *incumbent*, praktik kampanye negatif, *money politic*, mencuri start kampanye, manipulasi hasil perhitungan suara, terbatasnya jumlah

saksi, keberpihakan KPUD atau Bawaslu kepada salah satu calon dan sosialisasi pemerintah dan KPUD yang belum maksimal (Hollyson dan Sundari, 2015:36)

Banyak oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyimpang sekali dari aturan pelaksanaan Pemilu. Tindakan paling sering terjadi adalah mencuri *start* saat kampanye. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat, penyebabnya karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi, mereka hanya mengikuti orang yang ada disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif merupakan salah satu cara tidak sehat yang dilakukan untuk menjatuhkan “citra” pasangan lainnya (Hollyson dan Sundari, 2015:41). Kampanye negatif ini nantinya dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap Golongan Putih atau yang sering disebut Golput dalam Pemilu (Soebagiyo, 2008:82)

Tabel 1.1 Tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah pada Pilgub Jateng

Pemilihan umum	Tingkat Partisipasi(%)	Tingkat Golput(%)
Pilgub 2008	52,23	47,47
Pilgub 2013	55,53	44,27

Sumber: Suara merdeka

Banyaknya pandangan tentang pilihan Golput dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu hanya akan menambah masalah di dalam proses pemilihan. Memilih merupakan suatu tindakan untuk menentukan sesuatu yang di anggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun inklusif. Menurut Subakti, (dalam Yusuf, 2014), “perilaku memilih ialah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum”.

Sikap Golput pada hakikinya merupakan wujud upaya protes sekelompok orang. Hal ini tersebut merupakan upaya wujud pertentangan terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu yang sudah kita laksanakan. Penyebab orang bersikap Golput pada saat pemilihan antara lain calon tidak kredibel, tingginya tingkat kecurangan, rendahnya kesadaran politik, kesalahan teknis, apatis, sosialisasi belum optimal, dan menurunnya kepercayaan kepada partai politik. (Hollyson dan Sundari, 2015:135).

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih. Banyak warga masyarakat yang memiliki hak pilih tidak di dimanfaatkan dengan baik dalam proses demokrasi melalui PILKADA. Warga masyarakat tidak

ikut berpartisipasi aktif dalam proses PILKADA. Masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap proses PILKADA yang berlangsung.

Tabel 1.2 Persentase Pelaksanaan Pemilu 2004

Pemilihan Umum	Tingkat Partisipasi (%)	Tingkat Golput (%)
Pilkada 2004	65-75	25-35
Pemilu 2004	76,66	23,34
Pilpres 2004 Putaran 1	78,23	21,77
Pilpres 2004 Putaran 2	73,73	26,27

Sumber : Romli, 2008

Menurut data Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI), pemilih yang menggunakan hak pilih dalam PILKADA berkisar 65-75%. Angka ini lebih rendah dibandingkan pemilu 2004, dimana mereka yang tidak menggunakan hak pilih atau Golput sebanyak 23,34%. Sedangkan pada Pemilu Presiden 2004, dari sekitar 155 juta orang jumlah pemilih terdaftar, jumlah pemilih Golput 21,77% pada putaran pertama dan 26,27% pada putaran kedua. Di sejumlah daerah, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dalam PILKADA mencapai angka 30%. (Romli, 2008)

Dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi Indonesia. Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya Golput, dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dengan tingkat partisipasi politik pemilih tertinggi 96,6% pada Pemilu tahun 1971. Lebih-lebih jika dinilai dengan penyelenggaraan PILKADA sebagai bagian dari Pemilu yang telah berlangsung di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa sebagai konsentrasi mayoritas penduduk Indonesia juga

menunjukkan potensi Golput yang besar berkisar 32% sampai 41,5% (Soebagio, 2008:82)

Pemilihan Kepala Daerah 2005, angka Golput di Purworejo mencapai 26,63%. Berdasarkan data dari KPUD Purworejo dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada bulan Juni 2008 lalu, dari pemilih sebanyak 613.843 yang terdaftar di 1408 TPS untuk Kabupaten Purworejo, yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 381.634 orang (62,17%). Sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias Golput sebanyak 232.209 orang (37,83%). Jadi, jumlah angka Golput pada PILGUB 2008 meningkat sebesar 11,2% dari PILKADA 2005. (Sumber: KPUD Kabupaten Purworejo)

Berdasarkan data dari KPUD Purworejo dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 2010 lalu, pada putaran pertama dari pemilih sebanyak 633.806 yang terdaftar di TPS Untuk Kabupaten Purworejo, yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 398.065. Sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias Golput sebanyak 235.741 orang. Pada Pemilihan Kepala Daerah putaran kedua jumlah pemilih sebanyak 633.806 orang, yang menggunakan hak pilihnya hanya 372.430 orang. Sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias Golput sebanyak 261.376 orang. Jadi, jumlah angka Golput pada PILKADA tahun 2010 putaran pertama dan kedua peningkatan sebanyak 4,07%. (Sumber: KPUD Kabupaten Purworejo)

Tabel 1.3 Tingkat partisipasi masyarakat Purworejo pada Pilkada

Pemilihan Umum	Tingkat partisipasi (%)	Tingkat Golput (%)
Pilkada 2005	73,37	26,63
Pilkada 2010		
Putaran I	62,87	31,13
Putaran II	58,80	41,20
Pilkada 2015	61,71	38,29

Sumber: KPUD Purworejo

Data di KPU kabupaten Purworejo menunjukkan ada 3 kecamatan yang memiliki tingkat Golput paling tinggi. Peringkat pertama adalah kecamatan Purworejo sebanyak 20.501 suara, diposisi kedua berada di kecamatan Kutoarjo dengan 16.468 suara, sedangkan diposisi ketiga ada kecamatan Bruno dengan 15.155 suara. Berdasarkan PILKADA yang baru saja diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, data KPU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 menunjukkan dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Purworejo tingkat partisipasi terendah berada di kecamatan Bruno, dengan angka partisipasi politik hanya 57,43%. (Sumber: KPUD Kabupaten Purworejo)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu ketua RT di Desa Kambangan Kecamatan Bruno untuk mengetahui tingkat partisipasi politik di Desa tersebut peneliti memberikan pertanyaan apakah mereka menggunakan hak pilihnya, setidaknya dari 10 orang yang ditanya, hanya 4 orang yang menggunakan hak pilihnya. Artinya angka Golput bisa mencapai 60%, setelah diselidiki masyarakat mempunyai pandangan yang sedikit apatis tentang PILKADA, mereka mengatakan siapapun pemimpinnya akan sama saja, buktinya akses jalan desa dari dulu hingga sekarang belum pernah diperbaiki padahal sudah tak terhitung lagi orang yang mengumbar janji untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Penelitian bersama antara KPU kabupaten Purworejo dengan LAKPESDAM Nadhatul Ulama menyatakan bahwa berkaca, pada Pemilu tahun 2014 maraknya praktik kekerasan, *money politic*, dan lain sebagainya menjadi beberapa contoh bahwa masih ada pemilih yang irasional. Fakta adanya pemilih yang irasional menunjukkan betapa rendahnya tingkat ‘melek politik’ warga negara masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang makna dan arti penting Pemilu.

Tinggi-rendahnya tingkat “melek politik” warga negara dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan demokrasi. Jika tingkat “melek politik” itu tinggi maka demokrasi yang produktif menjadi suatu hal yang akan terwujud. Sebaliknya, jika tingkat “melek politik” warga negara rendah, maka kehidupan demokrasi akan kehilangan makna dan eksistensi karena yang hadir ialah demokrasi yang semu. Oleh karena itu, maka “melek politik” warga negara harus ditingkatkan. Peningkatan tersebut sangat mendesak dilakukan karena jika “melek politik” warga negara masih rendah, maka ini merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Peningkatan “melek politik” warga juga merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Sumber: Studi Analisis Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Purworejo).

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Wahyudi, dkk pada tahun 2013 menunjukkan ada hubungan yang positif antara kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi dengan tingkat partisipasi politik mahasiswa. Artinya, semakin tinggi kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi, maka semakin tinggi tingkat

partisipasi politik mahasiswa. Sementara kepuasan demokrasi tidak berhubungan langsung dengan partisipasi politik tetapi melalui kepercayaan politik. Artinya, kepercayaan politik menjadi variabel moderator antara kepuasan demokrasi dan partisipasi politik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desmawangsa (2013), menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa Program Study Administrasi Negara dalam Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman masih sangat rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rhoads (2012), menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan Bali, faktor tersebut mencakup politik meluas uang, revitalisasi lembaga adat dan identitas lokal melalui desentralisasi, dan memori kolektif pembubaran kekerasan gerakan perempuan Indonesia.

Dalam sistem politik demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuh kembangkan warga negara adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini dapat berupa sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang dapat menopang terwujudnya partisipasi politik. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PILKADA baik pemilihan Gubernur maupun Bupati, dalam prosesnya masih tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan. Permasalahan utama adalah Persepsi masyarakat yang sangat beragam tentang proses atau pelaksanaan PILKADA itu sendiri. Menurut (Rahmat, 2013:50) “bahwa Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan”. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pelaksanaan PILKADA yang demokrasi di daerahnya, dikarenakan kurang pemahaman tentang keberadaan demokrasi dalam PILKADA yang selazimnya sebelum memberikan suaranya dalam PILKADA harus memahami proses pelaksanaan PILKADA yang demokrasi serta rendahnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap caleg yang akan mewakili suara mereka. Ketidakpercayaan masyarakat ini pada ujungnya akan berdampak pada tingginya jumlah pemilih yang memiliki hak suara tetapi tidak menggunakan hak suara mereka pada saat pemilihan umum berlangsung (Heriyati dan Baroroh, 2015)

Permasalahan lain yang sering dihadapi diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan masalah sistem pendataan. Sistem pendataan berkenaan dengan masyarakat wajib pilih dalam sebuah daerah dan sering menjadi permasalahan mendasar pada pelaksanaan PILKADA. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak memilih, karena tidak di data sebelum pelaksanaan PILKADA. Kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilihan (KPUD) dan pemerintah yang belum optimal ,akan mengindikasikan banyaknya Golput yang terjadi (Hollyson dan Sundari, 2015:142)

Selain itu, terdapat pula masalah penetapan bakal calon maupun calon kepala daerah dalam satu wilayah yang berasal dari luar daerah sehingga tidak diketahui masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui latar belakang seorang calon kepala daerah yang akan di pilih. Pada akhirnya hanya menerima saja calon-calon yang telah ditetapkan walaupun tidak mengetahui latarbelakang calon tersebut.

Hal ini di akibatkan karena masyarakat tidak memahami penetapan bakal calon yang menjadi pimpinan wilayahnya.

Masalah lain yang sangat substansi dalam PILKADA adalah masalah pelaksanaan PILKADA itu sendiri. Masalah-masalah tersebut berjenjang mulai dari permasalahan pelaksanaan kampanye, masalah pemungutan suara dan masalah pengesahan calon terpilih yang selalu mendapat tantangan dari masyarakat itu sendiri sebagai pendukung pasangan calon yang kalah. Masalah ini merupakan kajian yang sangat penting dalam pelaksanaan PILKADA karena merupakan bagian dari tata cara kehidupan masyarakat berdemokrasi. Pentingnya kajian-kajian tentang masalah-masalah PILKADA dalam kehidupan masyarakat di daerah karena dapat menumbulkan pula masalah-masalah baru bagi masyarakat itu sendiri terutama persepsi masyarakat yang berbeda tentang proses pelaksanaan PILKADA (Rasyid, 2014)

Penyebab lain kurangnya pemahaman tentang PILKADA adalah kurangnya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, serta pengalaman keterlibatan masyarakat dalam kegiatan partai politik. Permasalahan merupakan paradigma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru tentang tata cara memandang dan mengapresiasi pelaksanaan PILKADA yang ada di Indonesia.

Apresiasi rakyat tentang PILKADA yang beragam tersebut yang kemudian menimbulkan tanggapan dalam bentuk persepsi yang berbeda pula tentang pelaksanaan PILKADA di lingkungannya. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan PILKADA di dalam suatu wilayah merupakan bahan kajian yang

sangat penting dalam upaya untuk mengetahui berbagai pendapat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia (Rasyid, 2014)

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap beberapa warga desa Kambangan, kondisi masyarakat desa Kambangan memiliki tingkat kesadaran memilih yang rendah, dalam pemilihan calon Bupati saja tidak semua masyarakat mengenal calon yang nantinya akan dipilih. Hal ini menyebabkan sikap acuh dan mempengaruhi tingkat Golput di desa Kambangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yusuf (2014) tentang Persepsi masyarakat pada CALEG terhadap perilaku memilih dalam pemilu Legislatif 2014, hasil penelitian menunjukkan sebanyak 45% perilaku memilih dipengaruhi oleh faktor Persepsi masyarakat. Di desa Kambangan sikap acuh dalam Pemilu didorong pula oleh kondisi geografis gunung yang sangat dingin, akses jalan yang tidak layak dan kondisi sosial budaya masyarakat. Serta kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang berkembang juga menjadi salah satu penyebab masyarakat menjadi apatis dan tidak peduli terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Masyarakat cenderung menganggap bahwa memilih atau tidak memilih calon tertentu tidak akan membawa makna yang berbeda bagi kehidupan mereka, hal inilah yang membuat warga masyarakat di Desa Kambangan memilih untuk Golput.

Di samping itu, partisipasi masyarakat tidak terlibat aktif dalam Pemilu, hal ini sangat memprihatinkan, masyarakat yang menjadi tim sukses juga mempertimbangkan apa yang dia peroleh secara individu maupun kelompok kepentingan. Partisipasi bukan dilandaskan keinginan untuk memilih salah satu pasangan calon atau untuk mendukung proses demokrasi tetapi, apa yang dia atau

mereka dapatkan apabila ikut berpartisipasi. Kondisi inilah yang menyebabkan kurangnya sosialisasi yang berefek langsung pada rendahnya Partisipasi politik di desa Kambangan. Secara umum apabila satu masyarakat memiliki pandangan yang bagus tentang PILKADA, memiliki harapan akan terjadi perubahan yang lebih baik, dan pemimpin yang ditunjuk menepati janji kampanye dan bisa mendengarkan aspirasi rakyat serta dapat dipercaya pastilah partisipasi politik warga desa terutama desa yang terpencil meningkat dan berimbas pada tingkat Golput yang redah dalam PEMILUKADA.

Asumsi tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adebayo dan Omotola (2007), menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dari pemilu yang sangat negatif pada April 2007 di Nigerian. Pendapat diteliti secara luas, pinjaman kredibilitas validitas dan reliabilitas mereka, persepsi dikuatkan oleh hasil dari pengadilan petisi pemilu yang telah dibatalkan beberapa pemilu. Salah satu kesimpulan yang tak terelakkan adalah bahwa pemilu April tahun 2007 adalah yang paling cacat dalam sejarah negara itu. Beberapa masalah yang paling terkenal yaitu penyimpangan terlambat dimulainya pemungutan suara, tidak memadai voting, kurangnya kerahasiaan dalam proses pemungutan suara, penghilangan nama dan atau gambar dari beberapa kandidat dari surat suara, prevalensi di bawah umur voting, suara isian, maraknya kasus suara-kotak menyambar di ujung pistol, dan pemalsuan hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2012) menunjukkan bahwa terdapat keragaman persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Mananggu Kabupaten Balemo yaitu persepsi terhadap penetapan bakal calon,

persepsi terhadap penetapan wajib pilih, persepsi terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan persepsi terhadap perhitungan suara dalam Pilkada.

Berdasarkan data diatas, terdapat keprihatinan yang cukup tinggi terhadap rendahnya Partisipasi politik masyarakat terutama di Jawa Tengah. Oleh karena itu, peneliti menetapkan Kabupaten Purworejo sebagai lokasi penelitian karena karakteristik daerah Purworejo yang berstruktur agraris dan masih memiliki kepatuhan terhadap pemuka di daerah mereka. Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Kambangan, Kecamatan Bruno karena di Kecamatan Bruno sendiri masih memiliki angka Golput paling tinggi berdasarkan data KPUD Purworejo tahun 2015, hanya 57,43% tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan tersebut. Sedangkan kecamatan lain yang memiliki partisipasi masyarakat rendah yaitu kecamatan Gebang dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 59,32% dan kecamatan Pituruh dengan partisipasi masyarakat sebanyak 59,79 %. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan Partisipasi politik. (Sumber: KPUD Kabupaten Purworejo).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan partisipasi politik di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo?
3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan partisipasi politik di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan Partisipasi politik di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah dengan partisipasi politik di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari diadakannya penelitian ini antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Memberikan informasi secara ilmiah mengenai gambaran proses Pemilihan Kepala Daerah di desa Kambangan, kecamatan Bruno, kabupaten Purworejo.

2. Menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya bersikap dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam berpartisipasi politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah.

#### 1.4.2 Manfaat Teoritis.

Menambah perbendaharaan penelitian dalam bidang komunikasi politik terutama tentang partisipasi politik sebagai acuan bagi penelitian serupa selanjutnya.



## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Partisipasi Politik**

##### **2.1.1 Pengertian Partisipasi politik**

Menurut Ife dan Testiero (2008:295) Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Sedangkan, penjelasan lebih lanjut mengenai partisipasi politik oleh Janda dkk (1992:228) bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat yang mempengaruhi atau dorongan terhadap pemerintahan dan dunia politik. Partisipasi ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bernegara sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Menurut Budiharjo (2008:368) partisipasi politik merupakan bagian dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi (Damsar, 2010 dalam Wahyudi, dkk, 2013). Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negaranya dalam berbagai proses politik. Menurut Surbakti (2010:151) “partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Richert 2010 (dalam Wahyudi, dkk, 2013) “partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang berusaha mempengaruhi peraturan dan keputusan

di berbagai *level* politik”. Menurut Rush dan Althoff (2008:23), partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Menurut Ibrahim (dalam Rohaniyah & Efriza) partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan atau mengubah kebijakan yang akan dan telah diambil oleh suprastruktur politik (pemerintahan). Sedangkan menurut Rahardiansah P. (dalam Rohaniyah & Efriza) partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan kebijakan sampai dengan penilaian kebijakan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Herbert McClosky (1972 dalam Budiharjo, 2008:367) seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat :

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly in the information of public policy*).

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga dengan penilaian keputusan termasuk juga ikut serta didalamnya.

### **2.1.2 Dimensi partisipasi politik**

Partisipasi politik mencakup sejumlah dimensi berikut Verba dan Kim (dalam Munjani dkk, 2011:83)

1. Ikut pemilihan umum (*voter turnout*)
2. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye pemilihan umum.
3. Aksi-aksi politik damai : menandatangani petisi, mengontak pejabat publik, demonstrasi, boikot, mogok.
4. Aksi-aksi politik dengan menggunakan kekerasan : merusak sarana publik (gedung, jalan, dan sebagainya) untuk memprotes keputusan politik tertentu, bentrok dengan petugas keamanan, pengeboman dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa di dalam Partisipasi politik individu harus ikut berperan di dalamnya. Karena di dalam Partisipasi politik mencakup sejumlah dimensi yaitu ikut Pemilihan Umum, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye Pemilihan Umum, aksi-aksi politik damai, dan aksi-aksi politik dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Pendapat lain datang dari Nimmo (1989:145) mengemukakan bahwa dimensi partisipasi politik yang dapat mempengaruhi antara lain:

#### 1) Gaya partisipasi

Gaya partisipasi merupakan kegiatan yang dilakukan dan bagaimana seseorang menyampaikan aspirasi politiknya. Gaya partisipasi ada yang secara langsung dan jelas atau tidak bertele-tele ada juga yang berbicara secara santai. Secara

umum gaya partisipasi sangatlah bervariasi. Adapun hal yang termasuk gaya partisipasi adalah sebagai berikut:

a. Langsung atau wakilan

Orang yang secara langsung melibatkan diri secara aktif dengan melakukan hubungan terus menerus dengan figur-figur politik dengan cara menelpon, mengirim surat, maupun datang ke kantor pemerintahan secara langsung.

b. Kentara atau tak kentara

Seseorang mengutarakan pendapat dalam berpolitik, hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material (seperti jika mendukung seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan)

c. Individual atau kolektif

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual (memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat, dsb). Bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demonstrasi untuk memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan

d. Sistematis atau acak

Dalam berpartisipasi politik bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, perasaan, dan usul mereka untuk melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak berkontradiksi, dan tindakan mereka kesinambungan dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan intensitas yang berubah-ubah

e. Terbuka atau tersembunyi

Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya, bergaya partisipasi terbuka.

f. Berkomitmen atau tak berkomitmen.

Warga negara berbeda –beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak dengan semangat dan antusias, ciri yang tidak terdapat pada orang yang memandang PEMILU hanya sebagai memilih satu orang dengan orang lain yang tidak ada bedanya.

g. derita atau kesenangan.

Seseorang bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan, yang lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

2) Motif partisipasi

Motif partisipasi merupakan tujuan yang melatar belakangi seseorang berpartisipasi dalam politik. Beberapa contoh motif partisipasi adalah:

a. Sengaja atau Tak Sengaja

Beberapa warga negara sengaja untuk mencari informasi dan berusaha untuk menjalankan roda pemerintahan ataupun sekedar mengikuti sistem demokratis

b. Rasional atau Emosional

Seseorang berpartisipasi dengan mengedepankan aspek rasional, bukan semata-mata berhayal dapat mencapai target tertentu tanpa melihat persiapan dan apa yang dimilikinya

c. Kebutuhan psikologis atau sosial

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan ketidacukupannya pada berbagai kelas “musuh” politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi.

d. Diarahkan dari dalam atau dari luar

Perbedaan partisipasi politik dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk berpartisipasi politik.

e. Berpikir atau tanpa berpikir

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain.

3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik.

Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik tersebut memiliki beberapa hal antara lain:

a. Fungsional atau disfungsional

Tidak setiap bentuk partisipasi mengajukan tujuan seseorang. Jika misalnya, tujuan seorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban kewarganegaraan yang di persepsi, maka pemberian suara merupakan cara fungsional untuk melakukannya.

b. Sinambung atau terputus

Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. Jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual, dan mengancam stabilitas, partisipasi itu terputus.

c. Mendukung atau menuntut

Melalui beberapa tipe tindakan, orang menunjukkan dukungan mereka terhadap rezim politik yang ada dengan memberikan suara, membayar pajak, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia kepada bendera, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai dimensi partisi politik dapat disimpulkan bahwa dimensi partisipasi politik merupakan cara seseorang melakukan politiknya, meliputi gaya politik, motif, tujuan, mapun cara dalam melakukan politiknya seperti ikut kampanye, menjadi tokoh politik dan sebagainya.

Secara umum dimensi partisipasi politik diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu partisipasi secara langsung dan secara tidak langsung. Partisipasi politik merupakan perwujudan dari perilaku seseorang dalam menjalankan karir politiknya. Partisipasi secara langsung berupa partisipasi yang mempunyai latar

belakang dan tujuan tertentu. Motivasi seseorang berpartisipasi secara langsung bisa berupa niat atau kesungguhan dari dalam hati karena terdorong untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi secara aktif diantaranya adanya orongan dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama.

Partisipasi politik secara tidak langsung merupakan perilaku yang dapat mendorong adanya kebijakan pemerintah. Perilaku ini bisa berupa pemasangan poster, ikut berdebat masalah kelebihan dan kelemahan calon pemimpin yang bisa mempengaruhi keputusan pemilih. Keikutsertaan dalam politik tentunya menimbulkan adanya konsekuensi. Apapun hasil yang didapat dalam politik hendaknya memiliki sifat menurut pada kebijakan pemerintah, bukannya menentang. Dengan begitu demokrasi yang baik akan terwujud dan masyarakat akan merasakan perubahannya.

### **2.1.3 Bentuk –bentuk Partisipasi politik**

Menurut Rush dan Althoff (1983:118) bentuk-bentuk Partisipasi politik merupakan sebuah hierarki atau tingkatan-tingkatan yang meliputi :

1. Apathis total
2. *Voting* (pemberian suara)
3. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
  4. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
  5. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasipolitical*)
  6. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasipolitical*)
  7. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

8. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
9. Mencari jabatan politik atau administratif
10. Menduduki jabatan politik atau administratif

Penjelasan mengenai perbedaan partisipasi politik oleh Janda dkk (1992:228):

*“We find the following distinction useful in analyzing political participation conventional participation is relatively routine behavior that uses the institutional channels of representative government, especially campaigning for candidates and voting in elections. Unconventional participation is relatively uncommon behavior that challenges or defies government channels or the dominant culture (and thus is personally stressful to participants and their opponents.*

Menurut Huntington dan Neslon (1994, dalam Rohaniyah & Efriza, 2015:488), bentuk-bentuk Partisipasi politik meliputi :

- 1) Kegiatan pemilihan, mencakup suara juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- 3) Kegiatan organisasi yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

- 4) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- 5) Tindakan kekerasan (*voilence*) juga dapat merupakan suatu bentuk Partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu katagori tersendiri: artinya sebagai upaya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Sementara itu Milbarth dan Goel (dalam Rohaniyah & Efriza 2015:490) membedakan Partisipasi menjadi empat katagori, yaitu

1. Apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam Pemilu.
3. Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, spesialis, mengadakan tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Pengritik, yakni orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam Partisipasi politik memiliki bentuk-bentuk Partisipasi politik yaitu kegiatan pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan. Serta Partisipasi politik memiliki empat katagori yaitu apatis, spektator, gladiator, dan pengritik.

Untuk berpartisipasi dalam politik, dibedakan dalam empat kategori diatas, yaitu apatis, spektator, gladiator, dan pengritik, sedangkan dalam pelaksanaannya partisipasi itu berbentuk kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan. Misalnya, seorang partisipan dalam kategori gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, maka orang tersebut akan berpartisipasi dalam bentuk melakukan kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan bahkan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

#### **2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik**

Menurut Tim Peneliti Patria *Institute* Blitar (2014:13) menjelaskan faktor partisipasi politik sebagai berikut:

##### **a. Faktor Sosial Ekonomi**

Setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur variabel status sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan pengaruh keluarga. Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih diantaranya:

##### **1. Pekerjaan**

Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih memungkinkan untuk partisipasi warga.

Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam PEMILU dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

## 2. Tingkat pendidikan

Dapat dikatakan turut mempengaruhi perilaku partisipasi politik masyarakat. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sebab pendidikan merupakan faktor yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menganalisa teori serta mampu untuk menentukan keputusan dalam persoalan-persoalan untuk mencapai tujuan menjadi faktor yang penting bagi masyarakat sebagai pelaku partisipasi aktif dalam pemilihan.

## 3. Pengaruh Keluarga

Keluarga juga memberikan pengaruh dalam hal tidak ikut memilih pada PEMILU, kuatnya pengaruh pimpinan keluarga (ayah) dalam menentukan pilihan politik keluarga. Secara umum apabila kepala keluarga tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh kepada anggota keluarga lainnya untuk tidak ikut memilih.

### b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku tidak partisipatif dalam politik disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara

langsung, betapa pun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (*personal effectiveness*), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan sebagainya. Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku tidak partisipatif dalam politik disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie, dan alienasi.

#### c. Faktor Pilihan Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya biaya memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi

digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu PEMILU ke PEMILU lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam PEMILU.

Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Menurut Millbart (dalam Maran 2001:156-157) menjelaskan faktor mempengaruhi yang mendorong partisipasi politik dijelaskan sebagai berikut;

1. Perangsang, seperti minat untuk berpartisipasi dipengaruhi, misalnya seperti mengikuti diskusi-diskusi politik melalui massa media atau melalui diskusi informal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, bahwa orang-orang yang berwatak sosial, yang mempunyai kepedulian besar terhadap *problem* (masalah) sosial, politik, ekonomi, dan lain-lainya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.

3. Faktor karakteristik sosial seseorang atau lingkungan sosial seseorang, baik menyangkut sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bahwa lingkungan sosial seseorang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam politik.
4. Faktor situasi dan lingkungan politik, bahwa lingkungan politik yang kondusif akan membuat seseorang dengan senang hati untuk berpartisipasi politik.

Menurut Efriza (2012:203) menjelaskan mengenai ketiga faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kadar partisipasi politik di negara-negara berkembang, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi dan fasilitas-fasilitas yang dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik, seperti adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik. Penjelasan lebih lanjut oleh Frank Lindenfield (dalam Maran, 2001:156) adalah kepuasan finansial, bahwa stress ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang teralienasi dari kehidupan politik dan hal ini tidak terjadi bagi orang yang memiliki kemapanan dalam ekonomi.

Menurut Morris Rosenberg (dalam Maran, 2001:156) yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik, sebagai berikut:

1. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik dan beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya
2. Karena beranggapan berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dijelaskan bahwa partisipasi politiknya tidak akan memengaruhi proses politik.

3. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi politik dan tidak menghargai gagasan-gagasan politik.

Atas dasar pendapat ahli diatas tentang faktor yang mempengaruhi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya atau meningkatnya partisipasi politik adalah adanya dorongan dalam diri individu (niat atau ketakutan untuk berpartisipasi dalam politik) dan karakteristik individu baik secara pribadi, tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, sosial, situasi dan lingkungan.

Menurut Surbakti (2010:169) mengemukakan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik, yaitu:

1. Lingkungan sosial tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, budaya, dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, kelompok pergaulan dan persepsi masyarakat.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain karena lingkungan sosial tak langsung, lingkungan

sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, struktur kepribadian individu, dan faktor lingkungan sosial politik langsung. Faktor lingkungan sosial politik yang mempengaruhi partisipasi politik salah satu diantaranya adalah persepsi masyarakat.

Menurut Surbakti (2010:184) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya kewajiban warga negara untuk menentukan pemimpin, dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain kedua faktor diatas ada faktor lain yang yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu faktor status sosial yang tinggi dan faktor citra dimasyarakat. Status sosial yang dimaksud adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, tingkat pendidikan, jabatan dalam pemerintahan yang menyebabkan adanya dorongan untuk berpartisipasi dalam politik. Adanya kepercayaan dari sekelompok masyarakat dapat mendorong seseorang berpartisipasi dalam politik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Surbakti (2010:185) yaitu” Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dalam partisipasi politik meliputi faktor *interen* dari dalam diri berupa kesadaran untuk menggunakan hak dan kewajibanya dalam berpartisipasi dan faktor *ekstern* berupa dorongan status sosial, dan ketidak sesuaian program pemerintah yang sudah berjalan sehingga mempunyai niat untuk memperbaikinya.

### **2.2.5 Tipe –tipe Partisipasi Politik**

Menurut Laster Milbarth dan M. L Goel tipe partisipasi politik dibagi menjadi 3 yaitu

1. Tipe penonton meliputi ketertarikan diri sendiri pada stimuli politik, mengikuti pemilu (legislative, eksekutif), mengikuti suatu diskusi politik, berusaha mendekati orang lain untuk ikut memilih dengan cara tertentu, dan menempelkan stiker pada kendaraan.
2. Tipe transisional mencakup kegiatan menjalin kontak dengan pejabat public atau pemimpin politik, memberikan sumbangan finansial pada parpol atau kandidat dan mengikuti suatu pertemuan atau perjalanan politik.
3. Tipe gladiator terdiri dari berbagai kegiatan politik antara lain menghabiskan waktu dalam suatu kampanye politik, menjadi anggota aktif dalam suatu parpol, menghadiri suatu kaukus atau pertemuan strategi, memajukan pengumpulan dana politik, menjadi kandidat untuk suatu jabatan, dan menjadi pejabat publik dan parpol.

## **2.2 Persepsi**

### **2.2.1 Pengertian Persepsi terhadap proses Pemilukada**

#### **2.2.1.1 Pengertian Persepsi**

“Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan” Rahmat (2015:50). Menurut Sears dkk 1994:52 (dalam Sugiyo 2005:34) “menyatakan bahwa persepsi adalah bagaimana seseorang membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka dan jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai kepada kesan tersebut dan bagaimana akuratnya pesan kita”.

Dalam persepsi, individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus itu mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan kesan pertama seseorang dari berbagai jenis informasi yang diterima seseorang untuk ditafsirkan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya.

#### **2.2.1.2 Proses Pemilukada**

Proses pelaksanaan Pemilukada diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan Pemilukada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”.

Secara umum Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan.

## **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dalam Pilkada meliputi:

- 1) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
- 2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir.
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada. a) Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. b) Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah.
- 4) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
- 5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan meliputi: penetapan daftar pemilih; pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; kampanye; pemungutan suara; penghitungan suara; dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, dilanjutkan dengan pengesahan, dan pelantikan. Secara lebih rinci jelaskan sebagai berikut:

### **1) Penetapan daftar pemilih,**

Proses penetapan daftar pemilih Pilkada meliputi:

- a. Penyusunan daftar pemilih sementara

Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang “Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” Pasal 3 dikemukakan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Dimana pemilih seperti juga tercantum pada pasal 4 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a). Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- b). Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c). Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan. Bila ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan lain-lain). Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota yang

akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa atau kelurahan.

b. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap

- 1) Daftar pemilih sementara akan disusul menjadi daftar pemilih tetap.
- 2) Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
- 3) Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau tempat lain yang strategis.

c. Pembagian kartu pemilih

1. Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap.
2. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/TW.
3. Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara.
4. Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.

**2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon**

Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon ketua atau wakil ketua Kepala Daerah adalah partai politik, atau gabungan partai politik.

**3) Kampanye Pilkada**

Kampanye dilakukan Pilkada selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara.

**4) Pemungutan Suara**

Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala atau wakil Kepala Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

#### **5) Penghitungan Suara**

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.

#### **6) Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih (termasuk pengesahan dan pelantikan)**

Pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan kepala atau wakil kepala daerah terpilih.

#### **2.2.1.3 Kesimpulan Persepsi terhadap proses Pemilukada**

Persepsi masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang disertai dengan perbincangan mengenai Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana didalamnya memuat aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sangat mewarnai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri untuk memilih seorang Kepala Daerah secara langsung. Masa depan daerah pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan nasional saja, melainkan juga ditentukan oleh keberhasilan seorang pemimpin daerah. Namun, permasalahan yang muncul di daerah adalah pemilihan langsung hanya menjadi rutinitas ritual politik saja, tanpa makna dan belum tentu membawa perubahan mendasar dalam sendi-sendi kehidupan sosial politik di daerah. Bahkan bisa juga hanya mempertegas pandangan masyarakat tentang pembodohan masal dan

pemiskinan struktural. Masyarakat hanya bisa menjadi komoditas politik elit untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah sebagai jalan untuk masyarakat sipil dalam kehidupan berpolitik, hanya sekadar “isapan jempol” politik, karena selama ini partisipasi politik serta perilaku politik masyarakat hanya masih dalam ruang politik mobilisasi, di mana masyarakat tidak paham makna politik yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti Pemilukada.

Pemilukada merupakan proses Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pemimpin sebelumnya. Pandangan masyarakat mengenai Pemilukada bermacam-macam, ada yang positif dan negatif. Persepsi positif masyarakat ditunjukkan dengan adanya harapan untuk menemukan pemimpin baru yang dapat memajukan daerahnya, hal ini diikuti dengan partisipasi politik yang baik dan memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani dan karena adanya pemaparan visi misi serta program kerja yang baik dari calon pemimpin.

Persepsi negatif yang datang dari masyarakat adalah, terlalu banyak calon yang ada dan kurang adanya sosialisasi mengenai proses Pemilihan Kepala Daerah. Siapapun pemimpinya hasilnya akan sama saja jadi males untuk milih “tutur salah satu warga” dalam studi pendahuluan. Proses Pemilukada yang melewati berbagai tahapan dengan proses yang sedemikian rumit membuat masyarakat acuh dan hanya memilih apabila ada yang menguntungkan saja.

### 2.2.2 Dimensi dalam persepsi

Menurut Calhoun dan Acocelia (1990:285) ada tiga dimensi dalam persepsi yang kita kenal secara baik, tiga dimensi yang sama yang menandai konsep diri :

#### 1) Pengetahuan

Apa yang kita ketahui (atau kita anggap tahu) tentang PILKADA, wujud lahiriah, perilaku, masa lalu, perasaan, motif dan sebagainya.

#### 2) Pengharapan

Gagasan kita tentang PILKADA itu menjadi apa dan mau melakukan apa dipadukan dengan gagasan kita tentang seharusnya dia menjadi apa dan melakukan apa.

#### 3) Evaluasi

Kesimpulan kita tentang PILKADA, didasarkan pada bagaimana seseorang (menurut pengetahuan kita tentang mereka) memenuhi pengharapan kita tentang dia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki tiga dimensi yang menandai konsep diri individu yaitu pengetahuan, pengharapan dan evaluasi. Tiga unsur tersebut saling berkaitan erat satu sama lain. Pada kenyataannya, masing-masing berdasarkan pada dua lainnya. Pengharapan kita terhadap sesuatu hal bergantung pada pengetahuan dan evaluasi kita terhadap hal tersebut. Begitu pula dengan evaluasi kita, bergantung pada pengetahuan dan harapan. Ketiga unsur tersebut adalah hubungan melingkar yang saling berkaitan.

Secara umum ke tiga dimensi di dalam partisipasi politik dalam Pilkada memiliki beberapa tahapan, tahap pertama yaitu pengetahuan, pengetahuan ini

dikaitkan dengan adanya sosialisasi mengenai kapan dilangsungkan Pemilihan Kepala Daerah, kemudian pemaparan calon pemimpin yang akan maju dalam Pemilukada sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menentukan pilihannya.

Tahap kedua adalah pengharapan, dengan adanya program yang tidak berjalan pada tahun sebelumnya, masyarakat berharap Pemilukada sebagai batu loncatan untuk membangun kembali daerah mereka dengan program yang membangun desa dan berusaha memperbaiki infrastruktur fasilitas umum yang ada. Pengharapan ini diapresiasi oleh calon bupati dengan berkampanye menjabarkan janji setelah menjadi bupati dan menjalankan program kerjanya dengan baik dan transparan.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi, menurut pandangan masyarakat berdasarkan informasi mengenai calon bupati yang ada, masyarakat bisa memberikan penilaian sekaligus mempercayakan hak suara untuk memilih salah satu kandidat calon bupati. Dengan adanya informasi mengenai calon yang maju dan dengan penjabaran tujuan dan janjinya masyarakat menjatuhkan pilihannya. Tahap berikutnya tinggal tugas pemimpin terpilih yang melaksanakan tugasnya.

### **2.3 Hubungan Persepsi dengan Partisipasi Pemilukada**

Persepsi memiliki tiga dimensi yang menandai konsep diri individu yaitu pengetahuan, pengharapan dan evaluasi. Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*)”, Miriam Budiarjo (dalam Rohaniyah & Efriza, 2015:472). Menurut

Huntington & Neslon (dalam Rohaniyah & Efriza, 2015:471) “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk memenuhi pembuatan keputusan pemerintah”.

Dari uraian mengenai persepsi dan partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok warga dalam segala tahapan kebijakan politik yang dilandasi persepsinya, yaitu pengetahuan, pengharapan dan evaluasi yang telah ia lakukan terhadap kebijakan politik tersebut.

Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilihan Umum ditentukan oleh beberapa hal diantaranya menyangkut pemilih. Hal itu merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik.

Partisipasi masyarakat Purworejo dalam Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo yang telah dilaksanakan mengalami penurunan. Golput merupakan fenomena yang alamiah, fenomena ini ada di setiap pemilihan umum hanya saja, hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan di anggap sehat jika jumlah Golput dalam kisaran angka 30%., meski

banyak pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, yaitu mencapai kisaran 40%.

Rendahnya partisipasi politik pada masyarakat Purworejo ini setelah di adakan study pendahuluan di sebabkan karena masyarakat mempunyai pandangan yang sedikit apatis tentang Pemilihan Kepala Daerah, mereka mengatakan siapapun pemimpinnya akan sama saja, buktinya akses jalan desa dari dulu hingga sekarang belum pernah diperbaiki padahal sudah tak terhitung lagi orang yang mengumbar janji untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerahnya ini telah menurunkan angka partisipasi politik masyarakat. Persepsi masyarakat bahwa politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara untuk berkuasa, dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik, sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya, hal ini jelas menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Persepsi ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.

Dimensi pengetahuan pada persepsi politik dapat diartikan sebagai proses mencari informasi mengenai calon kepala daerah yang dipilih. Partisipasi politiknya bisa ditunjukkan dengan memasang stiker salah satu kandidat, mendengarkan debat calon kandidat (termasuk tipe penonton). Dimensi persepsi selanjutnya adalah pengharapan kepada salah satu calon untuk memimpin daerahnya lebih baik. Partisipasi politik ditunjukkan dengan adanya peran secara

aktif memberikan dukungan berupa material untuk keperluan kampanye, pembuatan spanduk dan sebagainya dengan tujuan untuk berharap calon yang didukung dapat menang (tipe *transition*). Selanjutnya dengan adanya pengetahuan dan dukungan mengaitkan masyarakat memiliki keinginan untuk memilih salah satu kandidat dengan mempertimbangkan sikap perilaku yang mereka tahu.

Partisipasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pemilu. Partisipasi merupakan taraf atau tingkat keikutsertaan warga masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan politik seperti Pemilu baik secara aktif maupun pasif bisa secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Proses demokrasi sudah berjalan dari tahun ketahun dan berabad abad.

Berikut proses partisipasi menurut Mas'ood, (1994:45) menyatakan bahwa:

Pada abad ke 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberikan suara, atau menduduki jabatan pemerintahan telah dibatasi pada sekelompok kecil yang memiliki kekuasaan, kaya dan terpandang. Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa *renaissance* dan reformasi abad 15 sampai dengan abad 19. Tetapi bagaimana cara semua lapisan masyarakat (pedagang, petani, dan sebagainya) dalam berpartisipasi diatur dalam undang undang sesuai dengan negara masing-masing.

Partisipasi Pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut masyarakat. Tujuan dari Pemilu adalah untuk memilih calon kepala daerah. Persepsi masyarakat merupakan tanggapan yang dilakukan masyarakat terhadap

adanya Pemilukada. Tanggapan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa positif dan negatif.

Dari uraian diatas dapat ditarik gambaran mengenai hubungan antara persepsi masyarakat terhadap partisipasi Pemilukada. Persepsi merupakan pandangan yang dimiliki masyarakat mengenai Pemilukada, adanya persepsi masyarakat menimbulkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, partisipasi disini dapat berupa partisipasi secara langsung maupun tidak langsung .

## **2.4 Kerangka Berpikir**

Partisipasi politik memiliki pengertian beragam, diantaranya menurut Surbakti, (2007:140) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan masyarakat untuk mengikuti proses kebijakan politik secara umum.

PILKADA merupakan Pemilihan Kepala Daerah, di indonesia PILKADA diadakan secara serempak, tidak terkecuali pilkada di tingkat kabupaten yaitu pilihan Bupati. Pilkada merupakan suatu proses sistematis dan terencana untuk memilih kepala daerah. Proses PILKADA dimulai dari pendaftaran calon bupati, kemudian penentuan daftar pemilih tetap dan proses pemilihan umum. Setelah itu perhitungan suara dan dilanjutkan dengan pelantikan dan penetapan pemimpin kepala daerah yang baru.

Proses Pilkada sangatlah panjang dan rumit. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti proses PILKADA rendah. Di desa

Kambangan rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengikuti Pilkada dapat dilihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput). Disamping itu pengaruh lembaga sosial dalam Pilkada sangat mempengaruhi rendahnya partisipasi politik. Friedmen dan Hechter, (dalam Subekti 2014) menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak.

Lembaga sosial disini berupa KPUD, Parpol, Ormas, dan Media Massa. Peran lembaga ini sangatlah penting untuk memberikan informasi mengenai Pilkada. Sosialisasi yang dilakukan lembaga sosial terhadap pengertian Pilkada tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat terhadap Pilkada. Terlepas dari karakteristik individual memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, peneliti menemukan adanya faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Hal ini jika dihubungkan dengan Pilkada memiliki hubungan, jika masyarakat memiliki nasionalisme yang tinggi, kemudian keuntungan apa saja yang masyarakat dapatkan jika masyarakat berpartisipasi politik (menggunakan hak pilih). Biaya menjadi faktor pasti, ditambah kondisi desa Kambangan yang berada dipegunungan membutuhkan waktu dan tenaga untuk sampai ke TPS. Hasil Pilkada merupakan suatu barang, hasil pemilu ditentukan KPU, bagi masyarakat yang berpartisipasi secara gladiator, merasakan hasilnya secara langsung. Tetapi mayoritas masyarakat berpartisipasi secara penonton, dan

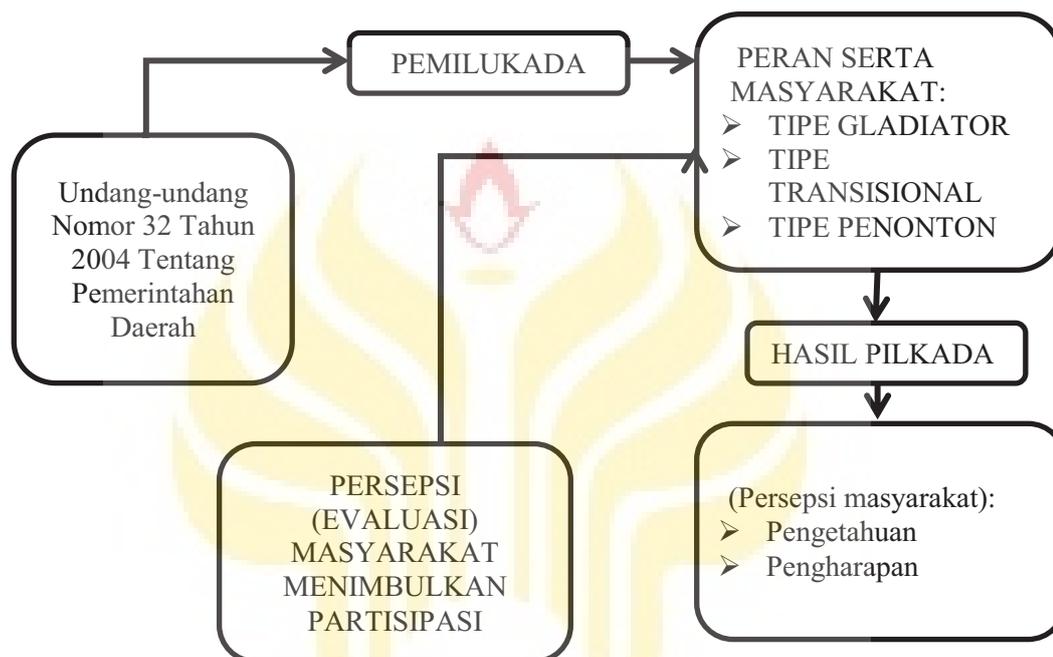
transional, sehingga tidak merasakan efek secara langsung mengenai hasil dari Pilkada.

Proses Pilkada yang sudah berjalan inilah yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada rendah. Pandangan masyarakat mengenai apa yang didapat ketika menggunakan hak pilihnya menjadi suatu alasan mengapa mereka berpartisipasi politik. Hal yang melatar belakangi masyarakat berpartisipasi politik salah satunya adalah persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat muncul karena adanya suatu pengalaman pernah melaksanakan Pilkada pada tahun sebelumnya.

Persepsi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan tanggapan masyarakat mengenai PILKADA. Terdapat tiga dimensi persepsi masyarakat. Pengetahuan, pengharapan, dan evaluasi. Pengetahuan merupakan adanya informasi mengenai pemimpin yang memimpin mereka telah habis masa jabatan dan akan dilakukan pemilihan pemimpin yang baru. Dengan adanya pemimpin baru diharapkan selalu menjadi lebih baik keadaan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maupun tidak mengalami peningkatan dari segala segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Hasil Pilkada merupakan suatu pengharapan dari masyarakat, sementara akibat yang ditimbulkan dari hasil Pilkada menimbulkan evaluasi dari masyarakat, apakah masyarakat merasakan hasil perubahan kebijakan secara signifikan ataukah tidak. Persepsi masyarakat ini berakibat pada pandangan dan pola pikir masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang merasa mampu memilih untuk mencoba berpartisipasi politik untuk merubah kebijakan yang ada.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka mengenai hubungan Persepsi masyarakat terhadap proses pemilukada dengan Partisipasi politik maka dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
Kerangka berpikir penelitian

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan dinamika hubungan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “ada hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dengan Partisipasi politik pada masyarakat desa Kembangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo“. Semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Umum Kepala Daerah maka semakin tinggi partisipasi politik, sebaliknya semakin rendah persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Umum Kepala Daerah maka semakin rendah partisipasi politik pada masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui sebagian besar partisipasi politik masyarakat desa Kambangan, kecamatan Bruno berada dalam kategori tinggi yang artinya masyarakat desa kambangan sudah memiliki kesadaran atau tingkat partisipasi politik yang baik.
2. Pada penelitian ini persepsi masyarakat desa Kambangan termasuk dalam tingkat tinggi, yang artinya secara global kondisi persepsi masyarakat desa Kambangan sudah baik mengenai Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dikarenakan lebih dari 80% masyarakat pernah mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah, sehingga mereka sudah mempunyai sudut pandang tersendiri mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah. Persepsi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal.
3. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara persepsi masyarakat terhadap proses Pilkada dengan partisipasi politik yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis inferensial dapat disimpulkan bahwa hubungan antara persepsi masyarakat dan partisipasi politik di desa Kambangan kecamatan Bruno adalah hubungan positif yang berarti semakin

tinggi persepsi masyarakat terhadap proses Pemilihan Umum Kepala Daerah semakin tinggi pula partisipasi politik masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disimpulkan dari hasil penemuan penelitian maka peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Subjek Penelitian (Masyarakat desa Kambangan)
  - a. Pada saat diberikan skala penelitian diharapkan memahami apa maksud dan tujuan dari di berikannya skala tersebut sehingga pada saat pengisian benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  - b. Mengingat pentingnya partisipasi politik di dalam pemilihan umum diharapkan masyarakat dapat lebih ikut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan Pemilihan Umum.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan tema yang sama penulis menyarankan:

- a. Memperluas ruang populasi, atau menambahkan variabel-variabel lain agar hasil yang didapat lebih bervariasi dan beragam sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih komprehensif.

Lebih teliti dalam pembuatan aitem permasing-masing indikator, subindikator dan memiliki target jumlah aitem per indikator agar semua indikator baik yang *favourable* ataupun *unfavourable* dapat terwakili.

Memberikan arahan dan penjelasan yang lebih menderail dalam proses pengisian skala atau alat ukur yang digunakan, agar subjek benar-benar memahami apa maksud dan tujuan dari di berikannya skala tersebut sehingga tujuan dan maksud dari penelitian yang ingin dilakukan dapat sesuai dengan sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, P. F., & Omotola, J. S. (2007). Public Perception Of The 2007 Nigerian General Elections. *Journal of African Elections*, 6(2), 201-206.
- Aldila Wikan, Lokeswara. (2011), Faktor-faktor yang mempengaruhi Golput (tidak memilih) dalam pemilihan walikota kota semarang 2010. *Thesis*. Universitas Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blitar, T.P. (2015). Kesukarelaan warga dalam politik di PEMILU Kabupaten Blitar Tahun 2004. Blitar. Komisi Pemilihan Umum
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Calhoun, J., & Acocella, J. R. (1990). *Psikologi tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Darmawangsa, C. (2013). Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Dalam Organisasi Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 683-687.
- Efriza. (2012). *Political explore sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta
- Fadhilatu nisa, Elviana. (2012). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Di Kabupaten Sragen. *Skripsi*. Program Studi Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Heriyati, L., & Baroroh, S. (2015). Persepsi Masyarakat Mengenai penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Ilmiah Cisoc*, 2(01).

Hollyson, R., & Sundari, S. (2015). *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Penuh Makna*. Jakarta: Bestari (Anggota IKAPI).

Ife. J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indra Dewi, Sulih., & Aminullah, Akhirul.(2014). *Perubahan Kesadaran Politik Perempuan Pada Pemilu 2004*.

[http://www.academia.edu/9277522/Perubahan\\_Kesadaran\\_Politik\\_Perempuan\\_Pada\\_Pemilu\\_2014](http://www.academia.edu/9277522/Perubahan_Kesadaran_Politik_Perempuan_Pada_Pemilu_2014)

Irawan, Dedi. (2015). Studi tentang politik uang (*money politic*) dalam pemilu legislatif tahun 2014 ( studi kasus di kelurahan sempaja selatan). *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 3(4), 1725-1738

Janda, K., Berry, J.M., & Goldman, J. (1992). *The Challenge of Democracy Government in America Third Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company

KPU Kotamobagu.2015. Pengaruh politik uang terhadap partisipasi dan referensi politik masyarakat kota Kotamobagu (studi kasus Pilwako 2013, Pileg dan pilpres 2014).

KPU Purworejo & LAKPESDAM NU. 2015. Korelasi Melek Politik Warga Dengan Partisipasi pemilih. *Studi analisis pemilihan umum tahun2004 di Kabupaten Purworejo: Purworejo*

Maran, R.R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Masitoh, Dewi., Utomo, Sulistio., & Widayat, Wiwik. (2013). Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=72917&val=4924>

Muhtar, Mas'oed. (1994). *Negara Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munjani, S., R, W. L., & Ambardi, K. (2011). *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan Media Utama.

Nimmo, D. (1989). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. (J. Rahmat, Ed., & T. Surjaman, Trans.) Bandung: Remadja Karya Offset.

Purwanto, E. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: CV Swadaya Manunggal.

- Rahmat, J. (2013). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, D. (2014). Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pilkada (Studi Kasus di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Other thesis*.
- Rhoads, E. (2012). Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali. *Journal of Current Southaast Asian Affais*, 31(2), 35-56.
- Rinjani, Rahmad. (2014). Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 2 ( 4 ) : 3469 -3481 ISSN 0000-0000
- Rohaniyah, Y., & Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Romli, L. (2008). Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada. *Jurnal Poelitik*, 1(1).
- Rush, M., & Althoff, P. (1983). *Pengantar Sosiologi Politik*. (K. Kartono, Trans.) Jakarta: CV. Rajawali.
- Rush, M., & Althoff, P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarbaini, Harpani Matnuh, Zainal. (2015). Persepsi masyarakat terhadap partai politik Di desa terantang kecamatan mandastana Kabupaten barito kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 5(9), Mei 2015
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soebagio, H. (2008). Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 12(2).
- Subekti, Tia. (2014) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi *Turn Of Voter* Dalam Pemilihan Umum Kepapa Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Ilmu Politik Universitas Brawijaya
- Sugiyono. (2015). *Komunikasi Antar Pribadi*. Semarang: UNNES PRESS
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: CV. Prima Grafika.

Syahputra, R. (2014). Retrieved Jumat, 20 November 2015, from Jangan Rebutnya Kembali Demokrasi Bangsa: <http://www.lpmdinamika.co/serba-serbi/opini/jangan-rebutnya-kembali-demokrasi-bangsa/>

UU Nomor 32 Tahun 2004

Wahyudi, H., Fernando, Tantio, Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, et al. (2013). Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2).

Wayan Surya Mahendra, I. (2016). Orientasi Memilih Calon Dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Wirata Agung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung

Yuliono, Anton. (2013). Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 173-184.

Yusuf, A. (2014). Pengaruh Persepsi Masyarakat pada Caleg terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Sidoarjo. *Jurnal Review Politik*, 04(02), 272-292.